



Forum Guru Besar
Institut Teknologi Bandung



Forum Guru Besar
Institut Teknologi Bandung

Orasi Ilmiah Guru Besar
Institut Teknologi Bandung

Profesor Iwan Sudradjat

**DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI
ARSITEKTUR INDONESIA**

22 November 2017
Aula Timur Institut Teknologi Bandung

**Orasi Ilmiah Guru Besar
Institut Teknologi Bandung**
22 November 2017

Profesor Iwan Sudradjat

**DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI
ARSITEKTUR INDONESIA**



Forum Guru Besar
Institut Teknologi Bandung

Hak cipta ada pada penulis

Judul: DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA
Disampaikan pada sidang terbuka Forum Guru Besar ITB,
tanggal 22 November 2017.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta ada pada penulis
Data katalog dalam terbitan

Iwan Sudradjat
DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA
Disunting oleh Iwan Sudradjat

Bandung: Forum Guru Besar ITB, 2017
vi+66 h., 17,5 x 25 cm
ISBN 978-602-6624-08-6

1. Sejarah dan Kritik Arsitektur 1. Iwan Sudradjat

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya, sehingga atas perkenannya penulis dapat menyampaikan orasi ilmiah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akademik atas pengangkatan pada jabatan Guru Besar di bidang Sejarah dan Teori Arsitektur, pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

Apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya disampaikan kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan orasi ilmiah berjudul **“Dekolonialisasi Historiografi Arsitektur Indonesia”** pada forum yang terhormat ini.

Dalam orasi ilmiah ini penulis akan mengkritik kerangka epistemologis warisan kolonial dan pasca-kolonial yang selama ini telah menentukan konseptualisasi dan kategorisasi dalam sejarah arsitektur Indonesia. Penulis kemudian mengembangkan wacana dekolonialisasi, sebagai langkah taktis dan strategis untuk membebaskan sejarah arsitektur Indonesia dari supremasi prinsip epistemik kolonial dan pasca-kolonial yang dominan, agar bisa mulai membangun prinsip epistemologis yang relevan bagi pengembangan disiplin keilmuan sejarah arsitektur Indonesia di masa kini dan masa mendatang. Dengan prinsip epistemologis yang baru, sejarah arsitektur Indonesia diharapkan akan dapat mengembangkan perspektif, kerangka dan tujuan studi

kesejarahan arsitektur yang bersifat lintas lokal/regional, ruang, waktu, dan budaya, sehingga mampu merangkul fenomena keberagaman dan kompleksitas kehidupan masyarakat dan arsitektur di bumi Indonesia.

Semoga naskah orasi ilmiah ini dapat membuka wawasan dan melahirkan inspirasi baru bagi para peneliti dan penulis sejarah arsitektur Indonesia, serta berkontribusi signifikan pada pengembangan sejarah arsitektur Indonesia sebagai disiplin ilmu yang otonom.

Bandung, 22 November 2017

Prof. Iwan Sudradjat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
II. GELOMBANG DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI INDONESIA	4
III. DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA	10
IV. KRITIK TERHADAP EPISTEMOLOGI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR WARISAN KOLONIAL	12
V. KRITIK TERHADAP EPISTEMOLOGI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR WARISAN ORDE BARU	22
VI. TUGAS SEJARAH ARSITEKTUR INDONESIA DI MASA KINI	26
VII. RE-INDIGENISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA	27
VIII. PENUTUP	37
IX. UCAPAN TERIMA KASIH	40
REFERENSI	42
CURRICULUM VITAE	51

DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA

1. PENDAHULUAN

Historiografi

Istilah historiografi masih sangat asing bagi para akademisi dan praktisi dunia arsitektur dan sejarah arsitektur di Indonesia. Istilah ini awalnya hanya merujuk pada kegiatan penulisan sejarah dan produk penulisan sejarah, namun kemudian berkembang meliputi pengertian tentang prinsip, teori, dan metode penelitian sejarah secara akademik. Conal Furay dan Michael J. Salevouris (1988) mendefinisikan historiografi sebagai *“the study of the way history has been and is written” – the history of historical writing*... *“When you study ‘historiography’ you do not study the events of the past directly, but the changing interpretations of those events in the works of individual historians”*.ⁱ

Historiografi adalah meta-analisis dari deskripsi historis. Historiografi tidak mempelajari peristiwa historis itu sendiri, melainkan bagaimana peristiwa historis dicatatkan, diinterpretasikan dan dipresentasikan oleh sejarawan. Seperti ditegaskan oleh Donald V. Gawronski (1969): *“historiography is the study of the various approaches to historical method, the actual writing of history, and, primarily, the various interpretations of historical events. Historiography is the study of the techniques employed by the individual historian”*.ⁱⁱ

Teori Pasca-kolonial:

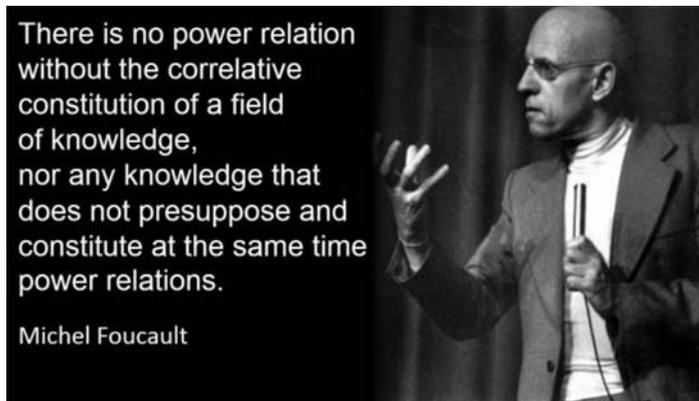
Teori Pascakolonial adalah diskursus intelektual pascamodern yang berisikan reaksi terhadap, dan analisis tentang warisan budaya kolonialisme. Istilah Pascakolonial tidak merujuk pada makna harfiah sebagai periode setelah masa kolonialisme, tetapi dimaknai secara lebih luas sebagai studi interaksi antara bangsa-bangsa Eropa dengan masyarakat yang pernah dijajahnya pada jaman modern. Para pemikir pascakolonial dihadapkan pada kenyataan, bahwa banyak asumsi-asumsi yang melandasi logika kolonialisme hingga kini masih merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh. Banyak daerah koloni yang telah menjadi negara merdeka dalam kenyataannya belum terbebas sama sekali dari pengaruh dominasi dan eksploitasi kekuatan ideologi kolonial. Deklarasi kemerdekaan negara negara bekas jajahan justru membantu penyamaran kekuatan neokolonialisme dalam bentuk modernisasi dan pembangunan di jaman globalisasi dan transnasionalisme.

Pengertian Dekolonisasi:

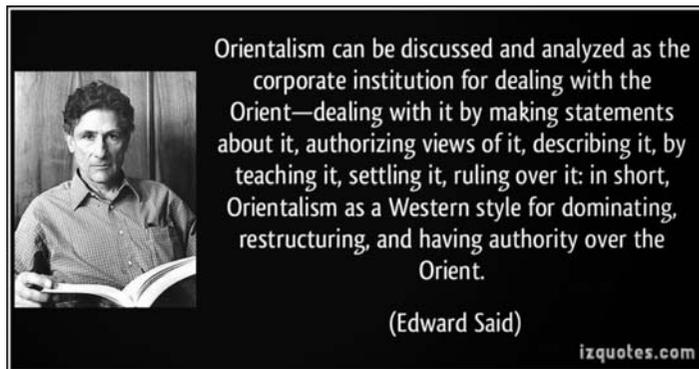
Istilah “Dekolonisasi” pada awalnya diartikan sebagai proses formal serah terima instrumen pemerintahan dari kekuasaan kolonial kepada pemerintahan negara yang baru merdeka. Namun di bawah pengaruh teori pasca-kolonial, istilah dekolonisasi kini dimaknai secara lebih luas, sebagai proses jangka panjang penghapusan warisan kekuasaan kolonial dalam berbagai bidang kehidupan. Gagasan tentang dekolonisasi historiografi muncul dari kesadaran bahwa sejarah yang ditulis dari perspektif kolonial tidak memberi ruang bagi kaum pribumi (*indigenous people*). Dekolonisasi historiografi berusaha merebut kembali apa yang

menjadi hak pribumi, merestorasi pandangan dunia, budaya dan tradisi kehidupan pribumi yang sejak lama dimarginalisasikan. Dekolonialisasi juga berupaya menggantikan interpretasi historis dari sudut pandang kolonial dengan sudut pandang pribumi, untuk merubah bagaimana cara pribumi memandang diri mereka, dan cara orang lain memandang pribumi (Joseph, B., 2017).ⁱⁱⁱ

Dalam naskah orasi ilmiah ini penulis akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip epistemik kolonial (taksonomi, konsep, periodisasi sejarah, klaster pengetahuan) secara kuat masih mendominasi ruang kehidupan sejarah arsitektur Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi, inkoherensi dan irasionalitas dalam pengembangan konsep, pelaksanaan penelitian, dan penulisan sejarah arsitektur Indonesia hingga saat ini. Dengan meminjam teori dan pisau analisis dari teori pascastuktural (*Power-knowledge nexus* Michel Foucault^{iv}, gambar No. 1) dan teori pascakolonial (*Orientalism* Edward Said^v, Gambar No. 2), penulis kemudian mengembangkan wacana dekolonialisasi, sebagai langkah taktis dan strategis untuk membebaskan sejarah arsitektur Indonesia dari supremasi prinsip epistemik kolonial, agar bisa mulai membangun prinsip epistemologis yang relevan bagi pengembangan disiplin keilmuan sejarah arsitektur Indonesia di masa kini dan masa mendatang.^{vi}



Gambar No. 1: Power-Knowledge Nexus, Michel Foucault (1926-1984)
(Sumber: Literary Theory and Criticism Notes – WorldPress.com)



Gambar No. 2: Orientalism, Edward Said (1935-2003)
(Sumber: Assignments - blogger)

II. GELOMBANG DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI INDONESIA

Sejarah tentang Hindia Belanda sebagai sebuah koloni umumnya

dibangun dari sudut pandang yang bersifat *Neerlando-centric*, di mana aktor berkebangsaan Belanda selalu tampil dominan dalam hampir semua peristiwa, sementara pribumi hanya memiliki peran yang tidak berarti^{vii}, seperti ditampilkan dalam karya-karya F.W. Stapel^{viii}. Pada tahun 1913 semangat untuk melepaskan diri dari historiografi yang bersifat *colonial-centric* ditunjukkan oleh Husein Djajadiningrat dalam karyanya tentang sejarah kritis Banten^{ix}, dilanjutkan oleh skolar Belanda yang progresif seperti Schrieke dan Van Leur di tahun 1930an dan Wertheim setelah Perang Dunia ke II^x, yang secara tidak ragu-ragu menempatkan kehidupan pribumi dalam panggung sejarah. Karya-karya mereka kemudian dianggap sebagai pelopor “*the writing of Indonesian history from within*”.

Lahirnya Republik Indonesia sebagai negara bangsa pada tahun 1945 semakin mendorong bangkitnya nasionalisme dan upaya dekolonisasi historiografi Indonesia. Sudut pandang *ethno-centric* digantikan oleh sudut pandang *nation-centric*, sementara *Neerlando-centric* digantikan oleh *the view-from-within*. Kedua pendekatan ini diterapkan untuk menjadikan bangsa, masyarakat dan budaya Indonesia sebagai *dramatis personae* dalam skenario panggung sejarah masa lampau Indonesia^{xi}.

Pada akhir tahun 1957 Seminar Nasional Sejarah yang pertama diselenggarakan di Yogyakarta, membawakan resolusi untuk melaksanakan rekonstruksi sejarah berdasarkan pada sudut pandang *Indonesia-centric*, yang menempatkan pribumi sebagai *dramatis personae* beserta peran, aktivitas dan seluruh aspek kehidupannya^{xii}. Seperti diungkapkan oleh Kartodirdjo, sejarah yang ditulis *dari dalam* akan

mampu mengungkapkan berbagai dimensi Indonesia di masa lalu dan pengalaman bangsa Indonesia secara utuh dan komprehensifⁱⁱⁱ. Namun menurut pengamatan Kartodirdjo dalam implementasinya para sejarawan telah terjebak dalam kondisi dilematis^{iv}: 1) apakah mereka harus menulis sejarah lokal dan regional terlebih dahulu, baru kemudian mengkonstruksi sejarah nasional berdasarkan sejarah lokal dan regional tersebut, atau 2) mereka menggunakan material historiografi kolonial yang ada untuk merekonstruksi sejarah nasional, namun dengan visi *Indonesia-centric*. Kartodirdjo memprediksi bahwa sudut pandang *Indonesia-centric* akhirnya hanya akan berhasil pada tataran konsepsi^v, namun gagal pada tataran eksekusi, karena sikap spekulatif terhadap *Indonesia-centrism* hanya akan membangkitkan titik perlawanan terhadap historiografi kolonial secara reaktif, namun tidak membawa manfaat dan tidak operasional bagi studi dan penulisan sejarah Indonesia dalam jangka panjang^{vi}.

Menurut Kartodirdjo, untuk mendekonstruksi historiografi kolonial, sudut pandang *Indonesia-centric* harus dipraktikkan sebagai sejarah kritis dan struktural, yang didukung oleh pendekatan multidimensional dan sosial-ilmiah^{vii}. Sejarawan harus memperluas perspektifnya dalam melihat peristiwa dan menggunakan perangkat konseptual sosial-ilmiah dalam melakukan berbagai interpretasi^{viii}, agar sejarah mikro yang berisikan berbagai aktivitas, dimensi dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia pada paras lokal dan regional dapat diungkapkan. Hanya dengan cara demikian sejarah akan mampu menyajikan gambaran proses kehidupan masyarakat Indonesia dan dimensi kemanusiaannya secara penuh^{xix}.

Kartodirdjo sangat mengandalkan pada konsep sejarah makro dan sejarah mikro untuk menjelaskan keterkaitan antara sejarah nasional dengan sejarah regional dan lokal. Sejarah nasional sebagai unit makro dapat dipandang sebagai kerangka acuan sekaligus kerangka sintesis bagi sejarah mikro (regional dan lokal), dan sebagai produk interaksi dan transaksi di antara unit-unit mikro. Sejarah nasional, regional atau lokal harus berinteraksi secara bersama mengikuti kekuatan *centripetal* dan *centrifugal*. Dengan demikian, interdependensi antara unit makro dan unit mikro akan merepresentasikan paras integrasi dan kohesi antara sejarah nasional, regional dan lokal^{xx}.

Dalam beberapa dekade berikutnya berkembang penelitian dan penulisan sejarah yang dilakukan secara akademik, sebagai bagian dari proses pembelajaran sejarawan Indonesia generasi-generasi pertama di Universitas Gajah Mada dan di Universitas Indonesia. Memasuki abad ke 21, tuduhan keras bahwa historiografi Indonesia telah gagal diajukan oleh dua orang sejarawan dari generasi kedua. Kuntowijoyo merujuk pada kegagalan kolektif sejarawan Indonesia untuk melaksanakan fungsi sosialnya, karena mereka cenderung berada di menara gading, tidak berani mengambil peran dan risiko sebagai kritikus sosial. Beliau menyarankan agar segera dilakukan perombakan mendasar dan menyeluruh pada bidang kesejarahan di Indonesia^{xxi}. Sementara itu Bambang Purwanto melalui serangkaian publikasinya menyatakan bahwa historiografi *Indonesia-centric* berada dalam kondisi disorientasi, dan secara ironis telah gagal merekonstruksi Sejarah Indonesia^{xxii}. Beliau berargumentasi bahwa sejak tahun 1957 historiografi Indonesia tidak mengalami perubahan secara signifikan, karena masih mengandalkan

pada rekonstruksi masa lalu sebagai simbol dari capaian bangsa, bukan sebagai cara untuk memahami masyarakat Indonesia^{xxiii}.

Ironisnya, historiografi *Indonesia-centric* yang menggantikan historiografi *colonial-centric* bahkan telah menciptakan banyak masalah yang berkaitan dengan kebenaran sejarah, akibat dominasi preferensi politis dan ideologis, serta kecenderungan ultra-nasionalistiknya. "Sejarah tidak lagi dipandang sebagai struktur penjelasan, tetapi sebagai suatu sistem legitimasi"^{xxiv}. Proses sejarah tidak mendapat banyak perhatian dibandingkan dengan produk sejarah, sehingga "tidak ada lagi kejelasan antara fakta dan fiksi di dalam penulisan sejarah Indonesia, karena anakronisme sudah menjadi bagian dari tradisi"^{xxv}. Sungguh, historiografi *Indonesia-centric* telah dicemari oleh konsep sejarah sebagai ideologi.

Menurut pengamatan Purwanto kegagalan tradisi *Indonesia-centric* dapat diamati dari beberapa indikator berikut: 1) ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari warisan sejarah kolonial dan dari cara pandang kolonial, bahwa sejarah itu tidak selalu harus merupakan sejarah politik; 2) ketidakmampuan untuk merepresentasikan masyarakat Indonesia, sejarah kehidupan sehari-hari mereka, dan sejarah yang humanis; 3) ketidakmampuan untuk mengembangkan penjelasan dan epistemologi alternatif; dan 4) kemalasan untuk menggunakan sumber-sumber kesejarahan alternatif dan inkonvensional. Akibat kegagalan-kegagalan ini historiografi *Indonesia-centric* hanya mampu memproduksi sejarah yang elitis dan formal, tidak memberi ruang bagi kehidupan sehari-hari, bagi nilai kemanusiaan, bagi perempuan dan anak-anak, serta bagi mereka yang termarginalisasikan.

Purwanto mengeluhkan bahwa telah lebih dari setengah abad para pelopor meletakkan dasar bagi pengembangan historiografi *Indonesia-centric*, namun generasi berikut tidak berhasil mengembangkannya menjadi suatu karya ilmiah yang dihormati dan diapresiasi oleh masyarakat secara umum sebagai media pembawa pencerahan. Justru sebaliknya, historiografi *Indonesia-centric* kini dipandang sebagai beban, karena sarat dengan kesempitan berpikir dan kebutaan dalam melihat kesempatan untuk mengembangkan perspektif historis, epistemologi dan metodologi alternatif^{xxvi}.

Para sejarawan Indonesia kurang inovatif, mereka cenderung menempuh jalan yang sudah berulang telah dilewati sebelumnya. Oleh karena itu Purwanto secara tegas mengingatkan agar dalam menulis sejarah Indonesia, sejarawan jangan mengikatkan diri pada satu tradisi dominan saja. Sejarawan harus membuka diri pada berbagai perspektif filosofis, epistemologi dan metodologi alternatif^{xxvii}, agar mereka mampu mendekolonisasi sejarah tanpa mengurbankan logika sejarah, dan bisa mulai membangun landasan yang lebih baik bagi historiografi "*New-Indonesia-centrism*" atau "*Post-Indonesia-centrism*", yang berpegang pada prinsip demokrasi, diversitas, multikulturalisme, non-diskriminasi, keterpercayaan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan^{xxviii}. Hanya dengan demikian sejarah bisa berfungsi sebagai media pencerahan yang dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik.

Kesalahan besar yang telah dilakukan oleh sejarawan Indonesia selama periode pasca-kolonial adalah mereka abai untuk melakukan

perubahan mendasar terhadap paradigma filosofis dan epistemologis yang telah diwariskan oleh kolonialisme, dan juga abai melakukan perlawanan terhadap pengaruh dominan kekuatan politik pasca-kolonial. Pendekatan komprehensif dalam re-evaluasi dan rekonstruksi sejarah perlu segera dilakukan, untuk menegakkan historiografi Indonesia yang ter-dekolonisasi.

III. DEKOLONIALISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA

Tidak dapat dipungkiri bahwa akar intelektual sejarah arsitektur Indonesia bersumber pada sejumlah praktik keilmuan yang berkembang di Hindia Belanda pada masa kolonial, termasuk arkeologi, antropologi, sosiologi perkotaan, perencanaan kota, dan arsitektur. Sangatlah tidak mungkin untuk membayangkan kondisi kesejarahan arsitektur di Indonesia di masa kini tanpa memperhatikan peran penting praktik-praktik institusional ini dalam produksi pengetahuan tentang arsitektur di Indonesia^{xxix}.

Meski praktik kelembagaan kolonial sudah lama berakhir, namun warisan-warisan dalam bentuk doktrin, konsep dasar, teori dan metode masih terus hidup hingga saat ini. Warisan-warisan tersebut berakar sangat dalam pada cara berpikir sejarawan arsitektur Indonesia, sehingga praktisi kesejarahan arsitektur di masa kini tidak memiliki pilihan lain kecuali membangun di atas pondasi yang telah ditinggalkan oleh para ilmuwan Belanda terdahulu. Selama lebih dari tujuh dekade terakhir, warisan tradisi masa kolonial tersebut terus berlanjut. Riset dan

penulisan sejarah arsitektur dilakukan dengan kerangka pemikiran yang sama seperti di jaman kolonial, namun dengan beberapa adaptasi dan reinterpretasi untuk menyesuainya dengan perubahan kondisi sosial politik yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dunia internasional. Bila kita teropong proses yang telah terjadi selama ini secara mendalam, akan ditemukan banyak kemadegan dan kebuntuan epistemologis di dalam pemikiran kesejarahan arsitektur Indonesia.

Tidaklah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa sejarah arsitektur Indonesia sebagai suatu disiplin keilmuan yang ajeg, dihormati, tertata baik, memiliki tujuan dan sasaran capaian yang jelas, belumlah hadir di tengah-tengah kita. Meski telah banyak diproduksi teks sejarah arsitektur di Indonesia, namun teks tersebut cenderung sporadis dan terfragmentasi, masih perlu diintegrasikan ke dalam suatu kerangka kesejarahan arsitektur yang koheren. Sungguh, sejarah arsitektur Indonesia sebagai suatu disiplin masih berada dalam kondisi *un-codified*.

Agenda untuk melakukan dekolonisasi historiografi Indonesia sudah sangat mendesak, karena konseptualisasi dan kategorisasi arsitektural warisan kolonial secara persisten telah menghambat pemikiran dan tindakan sejarawan arsitektur dalam perjuangan mereka untuk membangun disiplin sejarah arsitektur Indonesia yang otonom. Teori pasca-kolonial menekankan pentingnya pengungkapan bagaimana praktik sosial dan kultural di masa kini dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme. Praktik budaya kolonial hadir sebagai jejak atau residu dominasi kolonial yang berlangsung selama berabad-abad, sehingga pengaruhnya terhadap budaya masyarakat secara umum masih sangat

kuat. Cara berpikir warisan kolonial masih mempengaruhi dan menstrukturkan praktik dan representasi kita di masa kini, meski dalam kenyataannya kolonialisme sudah lama berakhir. Oleh karena itu, istilah pascakolonialisme tidak hanya diartikan sebagai periode setelah kolonialisme, tetapi juga cara bagaimana logika masa kolonial masih turut menata pengalaman kita di masa kini, menandakan adanya kontinuitas dan diskontinuitas dalam sejarah kekuasaan kolonial dan proses dekolonisasi. Menurut Stuart Hall masyarakat pascakolonial dicirikan oleh *after-effects* dari kolonialisme yang berkepanjangan dan persisten^{xxx}.

Di Indonesia, seperti di negeri bekas jajahan lainnya, praktek dan retorika kolonial tanpa disadari masih hadir dalam berbagai kategori, identitas, dan praktik representasional yang digunakan dalam wacana sejarah arsitektur masa kini. Di tengah popularitas konsep-konsep seperti arsitektur Indonesia, arsitektur nusantara, kearifan lokal, identitas nasional, perlu dicermati apakah masih ada praktik dan retorika kolonial, dan politik pascakolonial, yang melekat di dalamnya. Secara imperatif dekolonisasi pengetahuan harus dilakukan melalui kritik epistemologi kolonial dan pasca-kolonial, agar dapat dibukakan jalur-jalur epistemologi baru yang kondusif bagi berkembangnya sejarah arsitektur Indonesia sebagai disiplin ilmu yang otonom.

IV. KRITIK TERHADAP EPISTEMOLOGI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR WARISAN KOLONIAL

Istilah epistemologi merujuk pada teori tentang sifat dan landasan suatu pengetahuan, terutama dalam kaitan dengan batas-batas dan

validitasnya^{xxxi}. Epistemologi berfokus pada pertanyaan: bagaimana suatu pengetahuan dikonstruksikan, keyakinan apa yang melandasinya. Idealnya, seorang sejarawan perlu menyadari secara eksplisit komitmen epistemik yang melandasi seluruh kegiatan ilmiahnya; perspektif, teori, dan metode apa yang mereka gunakan dan kembangkan dalam melakukan kegiatan penelitian dan penulisan sejarah arsitektur. Namun harus diakui bahwa para skolar sejarah arsitektur di Indonesia masih sangat abai, tidak tertarik untuk melakukan analisis epistemologis dan membangun pendekatan kritis terhadap kegiatan ilmiahnya.

Untuk menilik ruang epistemik sejarah arsitektur Indonesia di masa kini, dapat diajukan pertanyaan utama: bagaimana sejarah arsitektur Indonesia dipraktikkan hingga sekarang; konsep, teori dan paradigma apa yang diterapkan dalam penelitian dan penulisan sejarah, rasionalitas apa yang memandu sejarawan dalam melaksanakan proyek historisnya, dan hambatan epistemologis apa yang dihadapi untuk membangun sejarah arsitektur Indonesia sebagai disiplin yang ilmiah dan otonom.

Bagi sejarawan arsitektur di Indonesia, pengungkapan bahwa imajinasi kolonial masih hadir di masa kini dan tengah beroperasi secara diam-diam namun efektif dalam kerangka berpikir dan paradigma yang dianut dan dipraktikkan dalam kegiatan akademiknya, akan menjadi suatu penggugah bagi pemahaman bagaimana kekuatan kolonial dan pascakolonial selama ini bekerja dalam disiplin ilmu mereka. Dengan demikian timbul keyakinan bahwa memang perlu dilakukan dekolonisasi terhadap konsep-konsep berpikir yang selama ini dipraktikkan dalam sejarah arsitektur Indonesia.

Untuk menunjukkan bagaimana warisan epistemologi kolonial berlanjut dalam sejarah arsitektur Indonesia, akan diungkapkan beberapa contoh konseptualisasi dan kategorisasi yang diturunkan dari tradisi antropologi dan arkeologi kolonial^{xxxii}.

Warisan Tradisi Antropologi Kolonial

Pemerintah kolonial Belanda tertarik pada pengetahuan tentang masyarakat di daerah koloni karena kemanfaatannya dalam mencapai tujuan kolonial. Perekaman secara sistematis penduduk pribumi di Hindia Belanda dilakukan sejak tahun 1800, ketika Dutch East India Company (V.O.C) secara resmi dibubarkan dan kendali kekuasaan ekonomi dan politik atas daerah koloni diambil-alih oleh pemerintah Belanda. Di akhir abad ke XIX akumulasi data lapangan tentang masyarakat dan kebudayaan pribumi meningkat sangat tajam. Seperti diungkapkan oleh van Eerde: *“no group of less civilized peoples has been so well described, so much studied and made so accessible to ethnological science as the peoples of the Dutch Indian archipelago”*.^{xxxiii}

Antropologi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda sangat bersifat empiris dan terfokus pada etnografi deskriptif penduduk pribumi, yang memetakan kestatisan dan heterogenitas dari budaya masyarakat pribumi^{xxxiv}. Dengan menjaga “primitivisme” dalam budaya dan “heterogenitas kesukuan” masyarakat pribumi, pemerintah kolonial berharap dapat mencegah berkembangnya nasionalisme “pan-Indonesia”, dan dengan demikian dapat mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda.

Di Hindia Belanda, seperti juga di negeri jajahan lainnya, pemetaan

etnis atau penggunaan peta kesukuan yang dibangun dalam ranah akademik, merupakan alat penting bagi administrasi dan dominasi kekuatan kolonial. Penempatan kelompok etnik dalam peta atau teks etnografis memudahkan pemerintah kolonial untuk membaca tingkat penguasaan dan penaklukan terhadap kelompok etnik tersebut. Setiap etnik dan wilayah ditampilkan secara statis, seolah masyarakat pribumi tidak memiliki dinamika internal dan peran dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Budaya material, termasuk arsitektur, digunakan secara signifikan untuk memperkuat citra statis masyarakat pribumi di Hindia Belanda (Gambar No.3 s/d No.6).



Gambar No. 3: Rumah Panjang di Kalimantan, circa 1935
(Sumber: KITLV 14541)



Gambar No. 4: Rumah Batak Toba di Samosir, circa 1930.
(Sumber: KITLV 82202)



Gambar No. 5: Rumah Kepala Suku di Batu Sala, Mahakam, Kalimantan, circa 1897.
(Sumber: KITLV 85673)



Gambar No. 6: Rumah Sunda di Kampung Sumedang, Jawa Barat, circa 1910.
(Sumber: KITLV 85673)

Di masa sekarang, tirani arsip kolonial masih sangat kuat dalam diskursus sejarah arsitektur Indonesia, dicirikan oleh ketergantungan pada dokumen tertulis jaman kolonial, disertai keyakinan bahwa kebenaran dan deskripsi otentik tentang masyarakat etnis dan arsitekturnya di Indonesia hanya tersimpan dalam teks kolonial, meski fakta empirik menunjukkan adanya dinamika perubahan dan perkembangan yang persisten sesuai konteks waktu dan tempat. Arsitektur etnik di Indonesia selalu dianggap tidak memiliki dimensi historis (*timeless*),

meski secara faktual selalu berubah, berkembang, dan dalam kasus ekstrim bahkan mengalami kepunahan.

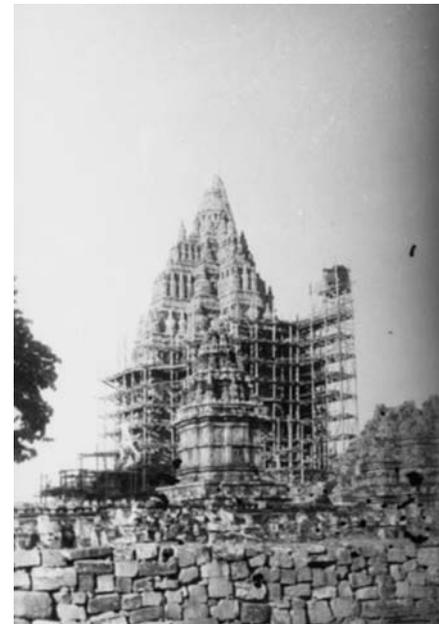
Tidaklah mengherankan apabila isu dan teori tentang dinamika internal masyarakat etnis, persamaan dan perbedaan antar etnis dan budaya, jarang sekali dibahas dalam diskursus sejarah arsitektur Indonesia. Sebagian besar peneliti lebih sibuk mendeskripsikan gambaran arsitektur etnis yang tidak lekang oleh waktu, alih-alih menganalisis arsitektur etnis yang dinamis, yang berubah dan berkembang menurut konteks waktu dan ruang.

Warisan Tradisi Arkeologi Kolonial

Kelahiran, perkembangan, dan institusionalisasi tradisi arkeologi di Hindia Belanda sangat sarat dengan kepentingan sosial dan politik pemerintah kolonial. Tradisi arkeologi di Hindia Belanda dapat dianalisis sebagai praktik institusional yang tugasnya adalah menangani sejarah kuno di wilayah koloni, dengan cara membuat pernyataan, deskripsi, otorisasi dan publikasi tentang subyek tersebut, sehingga tradisi arkeologi bisa tampil sebagai simbol kekuasaan dan otoritas kolonial atas subyek tersebut. Tradisi arkeologi menjadi pendukung proses kolonialisasi dengan cara menemukan kembali sejarah lama budaya masyarakat pribumi di daerah koloni. Melalui karyanya para arkeolog tidak hanya memperkaya informasi tentang budaya kuno masyarakat pribumi, tetapi juga menunjukkan posisi dominan kekuasaan kolonial dan otoritasnya atas daerah koloni (Gambar No. 7 s/d No. 10).



Gambar No. 7: Restorasi Candi Prambanan, circa 1890
(Sumber: KITLV 163101)



Gambar No. 8: Restorasi Candi Siwa,
Prambanan, 1941-53)
(Sumber: KITLV 166116)



Gambar No. 9: Restorasi Stupa
Utama, Candi Borobudur, circa 1866)
(Sumber: KITLV 408095)



Gambar No. 10: Candi Borobudur, circa 1930)
(Sumber: KITLV 151833)

Pemerintah kolonial menggunakan arkeologi sebagai alat untuk menunjukkan perannya di dalam penemuan kembali peradaban kuno yang selama berabad-abad telah terkubur, dengan pesan moral bahwa tanpa intervensi pemerintah kolonial, budaya dan peradaban kuno di wilayah jajahan tidak akan bisa ditemukan kembali dan diselamatkan. Dengan mengembalikan reruntuhan menjadi monumen, arkeologi menciptakan citra yang dapat ditampilkan dan direproduksi untuk menunjukkan kebesaran peradaban masa lampau yang pernah ada di wilayah jajahan, dan melegitimasi kehadiran pemerintah kolonial sebagai pemelihara cagar budaya peradaban masa lampau yang selama ini diabaikan oleh masyarakat pribumi^{xxxv}.

Domain keilmuan arkeologi di Hindia Belanda dibagi ke dalam empat area studi, yaitu: peninggalan Prasejarah, Hindu-Jawa, Islam, dan Asing (Eropa dan Cina)^{xxxvi}. Kategorisasi ini mencerminkan kerangka berpikir yang berlandas pada ideologi kolonial. Pendekatan para skolar pada sejarah wilayah koloni dipengaruhi secara kuat oleh prakonsepsi yang terkandung dalam cara pandang kolonial, yang senantiasa menyangkal peran masyarakat pribumi dalam proses sejarah. Rezim pengetahuan dan kekuasaan kolonial telah menciptakan sejarah wilayah kolonial yang didominasi oleh datangnya manusia, budaya dan ideologi dari tempat lain, yaitu imigrasi budaya kuno, Hindu, Budha, Islam, Cina dan Eropa.

Sejarah wilayah koloni dalam skenario ini dikonstruksikan berdasarkan ontologi dan epistemologi yang membedakan antara budaya pribumi dan budaya asing. Para skolar menerima antithesis budaya ini sebagai titik tolak untuk mengelaborasi teori dan deskripsi sosial tentang masyarakat,

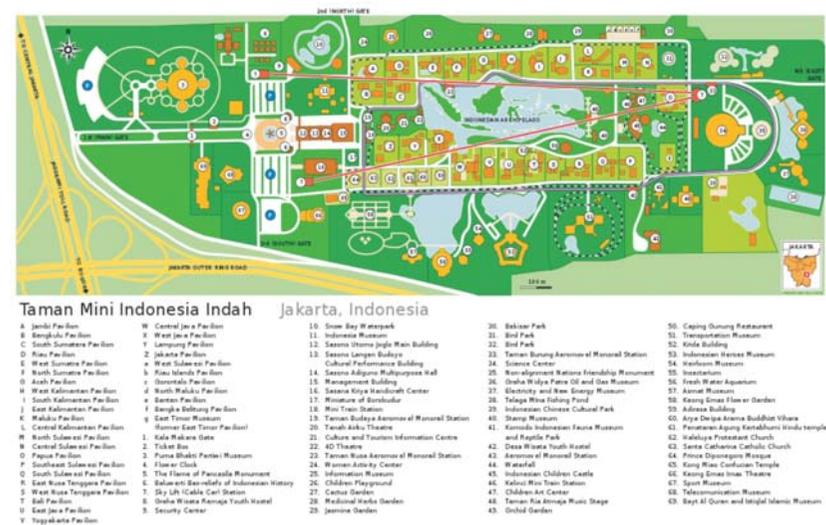
budaya dan adat pribumi. Tendensi ini terjadi meluas tidak hanya dalam domain keilmuan arkeologi, tetapi juga keilmuan lainnya. Penataan domain arkeologi, seperti juga periodisasi sejarah wilayah kolonial (sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada akhirnya bukan ditentukan oleh pembagian rasional bidang-bidang pekerjaan, melainkan berdasarkan prinsip ideologis. Isu-isu yang dibahas dalam tiap bidang studi pada dasarnya juga diturunkan dari pangkal epistemologis yang sama.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang epistemik di mana para sejarawan arsitektur Indonesia bekerja masih dibebani oleh warisan formal dari masa kolonial. Dari tradisi antropologi, diwariskan cara pandang terhadap budaya etnik dan regional yang sangat statis – nyaris tanpa dinamika internal, di mana seluruh atmosfer didominasi oleh konsep kontinuitas alih-alih perubahan. Sementara dari tradisi arkeologi, diwariskan suatu periodisasi historis yang dianggap berlaku menyeluruh (periode Pra-Hindu, Hindu-Budha, Islam, Kolonial, dan Pascakolonial), yang merepresentasikan penyangkalan terus-menerus terhadap peran otonom masyarakat pribumi dalam proses sejarah. Perlu dicatat bahwa masuknya agama Hindu, Budha dan Islam ke kepulauan Nusantara dari berbagai sumber hanya memberi dampak superfisial pada beberapa wilayah tertentu. Banyak wilayah dan kelompok etnis di Indonesia yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran pengaruh luar tersebut^{xxxviii}.

V. KRITIK TERHADAP EPISTEMOLOGI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR WARISAN ORDE BARU

Pengaruh politik pascakolonial pada epistemologi historiografi

arsitektur Indonesia dapat dilihat dari warisan rezim kekuasaan dan pengetahuan di era Suharto^{xxxviii}. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengembangkan kebijakan domestik yang berdasarkan pada slogan Pancasila: “*Bhineka Tunggal Ika*” – Kesatuan dalam Keragaman. Kesatuan ini ditemukan di masa lampau, dengan menggali dan menghormati memori tentang nenek moyang, menghargai dan menghormati tradisi budaya mereka, serta mengidentifikasi dan menekankan pada kesamaan di tengah-tengah berbagai perbedaan. Kebangkitan kembali budaya tradisional, yang diasosiasikan secara kuat dengan citra publik tentang pemerintah Orde Baru, ditandai oleh pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diresmikan oleh Presiden Suharto di bulan April 1975 (Gambar No. 11).



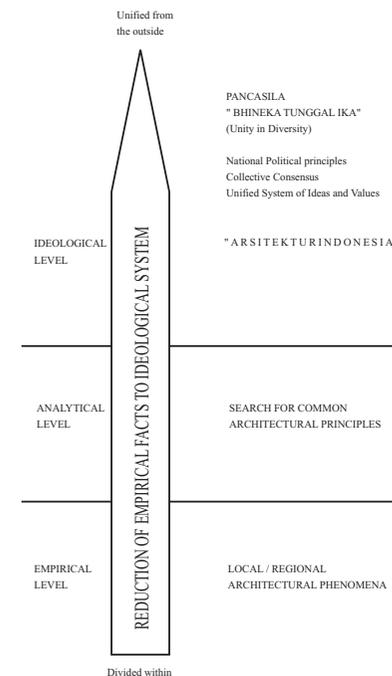
Gambar No. 11: Peta Taman Mini Indonesia Indah (Sumber: Brosur TMII)

Implikasi proyek TMII bagi perkembangan arsitektur di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam mengurangi penggunaan gaya modern dalam arsitektur kontemporer, digantikan oleh kanon artistik tradisional. Presiden Suharto dan ibu negara Tien Suharto memiliki peran penting dalam program pembangkitan nostalgia daerah rural Indonesia secara luas, terutama melalui penggunaan tema-tema arsitektur etnik. Tidaklah mengherankan apabila penggunaan gaya arsitektur tradisional di Indonesia kemudian mewabah, mencakupi bangunan kantor pemerintahan, bank, hotel, kampus, dan sebagainya. Adopsi gaya tradisional secara indiskriminatif dalam banyak kasus merefleksikan sisi ironis dari propaganda arsitektur Orde Baru, yang lebih berkeinginan untuk mengungkapkan esensi dan kontinuitas, alih-alih eksistensi dan perubahan^{xxxix}.

Meski penulisan sejarah arsitektur itu sendiri tidak bersifat politis, namun pada akhirnya juga memiliki muatan politis, karena harus hadir dalam kerangka politis dan harus merespon dan beradaptasi dengan berbagai ekspresi preferensi politik dan sosial yang senantiasa berubah sepanjang waktu. Apabila pemerintah kolonial Belanda menggunakan arsitektur untuk menunjukkan capaian ideal politik kolonial dan melegitimasi tindakan kolonialnya di Hindia Belanda, maka pemerintah Orde Baru menggunakan arsitektur untuk membangkitkan kesadaran dan identitas nasional, serta untuk memperkuat ideologi kesatuan bangsa.

Impuls nasionalistik pemerintah Orde Baru telah memerangkap diskursus sejarah Indonesia, termasuk sejarah arsitektur Indonesia, dalam proyek visioner pencarian "identitas nasional". Lahirnya teori tentang "Arsitektur Indonesia" merupakan konsekuensi logis dari skema-skema

nasionalistik tersebut. Menirukan model politik, sejarawan arsitektur Indonesia berusaha menciptakan suatu kesadaran kolektif melalui pencarian kesamaan prinsip di dalam fenomena arsitektural yang beragam dalam ruang dan waktu, melalui teori Arsitektur Indonesia yang diturunkan dari slogan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya satu di dalam keberagaman (Gambar No 12). Konsep ini kini telah terinstitusionalisasi secara luas, sehingga secara umum diterima sebagai program bagi dunia praksis arsitektur di Indonesia. Teori Arsitektur Indonesia bersifat sangat reduksionis, cenderung mengarah pada homogenisasi dan unifikasi berdasarkan kesamaan, dengan mengabaikan berbagai diskrepansi yang terjadi di lapangan^{xi}.



Gambar No. 12: Teori Arsitektur Indonesia
(Sumber: Iwan Sudradjat, 2008)

Setelah menelaah landasan ideologis, kategori teoritis, dan konsep analisis warisan kolonial dan pascakolonial yang mendominasi diskursus dan membatasi pengetahuan tentang sejarah arsitektur Indonesia, kita berada dalam posisi untuk mencari alternatif filosofis dan epistemologis baru sebagai landasan yang lebih baik bagi penelitian dan penulisan sejarah arsitektur Indonesia di masa depan. Pertanyaannya bukan apakah sejarawan arsitektur Indonesia dapat menutupi celah-celah pengetahuan yang sudah dirintis oleh skolar di jaman kolonial, tetapi apakah mereka mampu menghasilkan suatu pengetahuan tentang sejarah arsitektur Indonesia yang berbeda dari kategori-kategori kolonial.

VI. TUGAS SEJARAH ARSITEKTUR INDONESIA DI MASA KINI

Tugas intelektual seperti apa yang harus diemban oleh disiplin sejarah arsitektur di negara pascakolonial seperti Indonesia?

- Pertama, membebaskan historiografi Indonesia dari kekuatan dominan kolonial dan pascakolonial, dengan cara mengungkapkan warisan epistemologi yang telah membelenggu narasi dan praktik kesejarahan arsitektur di Indonesia, termasuk membebaskan pengaruh nasionalistik dalam penulisan sejarah.
- Kedua, menghapus impuls kolonial yang secara persisten telah mengabaikan dinamika internal-lokal, dengan cara menunjukkan dinamika transformatif, jejak historis, dan formasi historis dari arsitektur di Indonesia, dibantu oleh penggunaan teori dan metodologi yang relevan.
- Ketiga, membuat deskripsi berbasis fakta serta narasi komparatif,

yang menunjukkan persamaan dan perbedaan pengalaman arsitektural masyarakat dari berbagai kelompok etnik dan daerah di Indonesia menurut ruang dan waktu, serta proses pencampuran dan penggabungan antara arsitektur etnik (alih-alih potret statis “*sui generis*” suatu etnik atau daerah tertentu saja), untuk memahami peran otonom masyarakat etnik dalam proses historis dan alur perkembangan arsitektur mereka.

- Keempat, mengadopsi perspektif multidimensional, agar peristiwa historis dapat dijelaskan sebagai hasil dari kaitan yang kompleks antara faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, religi, dan lainnya.
- Kelima, berorientasi pada pengembangan tradisi historiografi yang “ilmiah”, sebagai bentuk perlawanan terhadap tradisi historiografi nasionalis yang sangat rentan terhadap manipulasi politik.

Pengetahuan yang lahir dari proyek historis yang bersandar pada kerangka intelektual tersebut di atas, akan sangat bermanfaat dan memperkaya peta pengetahuan tentang sejarah arsitektur di Indonesia, namun untuk mengimplementasikannya dibutuhkan perubahan orientasi teoretis dan konseptual, serta kemampuan sejarawan untuk bekerja dengan fenomena budaya yang besar, luas dan kompleks.

VII. RE-INDIGENISASI HISTORIOGRAFI ARSITEKTUR INDONESIA

Menurut Bob Joseph (2017), langkah lanjut dari proses dekolonialisasi adalah re-indigenisasi (*re-indigenization*); bahwa pandangan dunia, pengetahuan dan perspektif masyarakat lokal harus diakui validitasnya

dan dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk diekspresikan. Namun harus disadari bahwa masyarakat lokal tidak memiliki pandangan dunia yang tunggal. Tiap komunitas budaya memiliki pandangan dunianya yang berbeda-beda^{xii}.

Re-indigenisasi perlu dilakukan dalam wacana kesejarahan arsitektur, untuk mengantarkan kembali bangsa dan arsitektur Indonesia ke dalam sejarahnya sendiri^{xiii}. George Dei mendefinisikan *indigenusness* sebagai kesadaran pengetahuan yang tumbuh secara lokal, yang sangat berbeda dengan pengetahuan konvensional, karena sudah terbebas dari beban ideologi kolonial^{xiiii}. *Indigenusness* merujuk pada norma, nilai sosial, dan konstruk mental tradisional yang memandu, mengorganisasikan dan mengatur cara hidup masyarakat lokal dan cara mereka memahami dunianya.

Menurut Kartodirdjo, untuk mengantarkan bangsa Indonesia kembali ke dalam sejarahnya, sejarawan harus memperluas lingkup spasialnya agar mencakupi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam konteks tradisional dan modern, baik di daerah urban atau rural, dan lebih menekankan pada sejarah mikro, yaitu sejarah lokal dan regional^{xlv}. Kartodirdjo mendefinisikan sejarah lokal dan regional sebagai kompleks kesejarahan yang mencakupi aspek multidimensional dari totalitas pengalaman kolektif masa lampau masyarakat di suatu daerah atau regional, yang bisa dipahami sebagai suatu sistem. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa sejarah lokal dan regional merupakan unit otonom yang digerakkan oleh kekuatan endogen, yang berfungsi mempertahankan dan mengembangkannya. Namun tidak berarti bahwa semua proses dan struktur yang ditemukan dalam unit dapat dijelaskan

tanpa menyinggung pengaruh kekuatan eksogen yang mempengaruhi sistem^{xlv}.

Sepintas terkesan sangat paradoks, bahwa di abad nasionalisme sejarawan justru harus menemukan kembali sejarah lokal dan regional, namun perlu diingat bahwa formasi identitas nasional dan kebangsaan memerlukan identitas dari tataran yang lebih rendah, yaitu identitas regional dan identitas lokal. Kartodirdjo memiliki keyakinan bahwa rekonstruksi sejarah regional dan lokal akan mendukung penemuan atau formasi identitas nasional^{xlvi}. Namun, meski pluralitas masyarakat Indonesia sangat kasat mata, sejarah nasional yang harus dikonstruksikan bukanlah sekedar agregat sejarah-sejarah regional dan lokal belaka, melainkan suatu amalgamasi sejarah-sejarah tersebut yang berfungsi secara interdependen sebagai bagian dari kesatuan sistem yang koheren. Perhatian khusus perlu diberikan pada interkoneksi antara bagian-bagian, juga pada jejaring yang terbangun dari proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya sepanjang waktu^{xlvii}. Peristiwa-peristiwa unik pada tingkat lokal akan menjadi lebih bermakna apabila diperbandingkan, untuk menunjukkan kesamaannya dalam struktur, sistem, tendensi, dan pola^{xlviii}. Perlu diakui bahwa generalisasi pada paras nasional perlu diuji silang dengan variasi lokal dan regional, dan sejarah lokal dan regional harus memiliki fungsi penguatan terhadap penulisan sejarah nasional^{xlix}. Dengan demikian, keunikan lokal dan regional juga akan lebih menonjol^l.

Menurut ahli hukum adat Ter Haar, Indonesia memiliki kurang lebih 19 wilayah budaya^{li}. Sebagai contoh, Aceh, Minangkabau, Jambi, Palembang, Banten, and Priangan masing-masing bisa dianggap sebagai unit sejarah yang memiliki batas sosio-kultural tersendiri. Dapat

diantisipasi bahwa masing-masing unit lokal dan regional akan menampilkan varian pola umum, warna khas, dan faktor atau kekuatan yang mempengaruhinya. Seluruh varian lokal harus dipertimbangkan dalam rekonstruksi sejarah nasional versi baru^{liii}. Di satu sisi, konfigurasi yang terbentuk oleh unit-unit ini akan menentukan kerangka sejarah Indonesia sebagai suatu kesatuan, di sisi lain, perubahan pada paras nasional akan berimbas ke paras regional dan lokal, sehingga terjadi interdependensi antara kekuatan nasional, regional dan lokal, dan sebagai konsekuensinya generalisasi yang dibuat pada paras nasional akan valid juga pada paras regional dan lokal^{liiii}.

Karena sulit untuk menetapkan batasan dari kompleks kesejarahan, menurut Kartodirdjo akan lebih strategis apabila pusat digunakan sebagai titik orientasi, sementara dinamika historis dari peristiwa-peristiwa dipetakan sebagai pergerakan *centrifugal* dan *centripetal* yang memotong lingkaran-lingkaran konsentris sekitar pusat. Faktor penentu dari dinamika tersebut adalah kekuatan geografis, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang bekerja di dalam dan di luar wilayah yang distudi^{liiv}.

Bambang Purwanto tampak sepakat dengan rekomendasi Kartodirdjo untuk bergeser dari sejarah makro ke sejarah mikro, untuk dapat menangkap kembali realitas historis kehidupan sehari-hari masyarakat yang selama ini tidak pernah diakui sebagai bagian dari sejarah, dan oleh karenanya tidak pernah diberikan tempat dalam historiografi Indonesia^{liiv}. Untuk memberikan dukungan pada rekomendasi pergeseran ke sejarah mikro, Purwanto menyoroti miskonsepsi yang selama ini terjadi tentang awal mula sejarah Indonesia.

Sejarah Indonesia umumnya dimulai dengan datangnya peradaban Hindu-Budha, Islam dan Barat, sementara periode sebelumnya diklasifikasikan sebagai periode Pra-sejarah. Masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat Dani di Papua dianggap tidak memiliki sejarah, sebelum mereka kontak atau berinteraksi dengan orang luar. Mereka seolah tidak memiliki hak untuk merekonstruksi masa lampau-nya tanpa dokumen yang ditulis oleh orang luar, atau dalam hal ini orang Barat yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidangnya. Memori kolektif mereka tentang masa lalu hanya dianggap sebagai legenda atau mitos, bukan interpretasi realitas masa lampau yang otentik^{livi}.

Sejak tahun 1960an, penulisan sejarah lokal di Indonesia digalakkan untuk mengangkat peran dan harkat masyarakat lokal dalam formasi Indonesia sebagai kesatuan geo-politik, dan untuk menjaga keseimbangan antara sejarah lokal dan regional, serta menghapuskan kecenderungan Java-Centrisme^{liiii}. Pada tahun 1999 pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kebijakan nasional berupa desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat kepada pemerintah lokal, yang membuka kesempatan luas bagi sejarah lokal untuk berkembang. Namun menurut pengamatan Purwanto, konstruksi sejarah lokal pasca desentralisasi justru dicirikan oleh dua kecenderungan yang negatif. Pertama, konstruksi sejarah lokal tidak terkait langsung dengan unit administrasi dan kultural, tetapi dengan elemen lain yang secara intensional dihadirkan untuk menunjukkan perbedaan identitas yang mencolok antara satu dengan lainnya. Kedua, konstruksi sejarah lokal cenderung terjerumus kembali ke dalam regionalisme dan etnosentrisme,

suatu perspektif dominan yang menjadi ciri tradisi historiografi kolonial. Eksistensi sejarah lokal di era desentralisasi secara sistematis digunakan sebagai basis legal untuk legitimasi historis, kultural dan intelektual kekuatan politik lokal pada umumnya, dan kepentingan kelompok elit atau etnik dominan pada khususnya.

Ironisnya, sejarah nasional tidak lagi dianggap sebagai kerangka referensi dan kerangka sintesis bagi sejarah lokal, di mana sejarah lokal sebagai subsistem dari sejarah nasional akan menentukan formasi identitas nasional dan kebangsaan. Sejarah lokal justru cenderung melepaskan diri dari konsep kesatuan nasional^{lviii}. Dalam mengekspresikan kekuatan simboliknya melalui arsitektur bangunan, para gubernur, walikota dan bupati lebih memilih preseden arsitektur Capitol Building di Washington, arsitektur klasik atau arsitektur kolonial, alih-alih preseden arsitektur lokal yang seharusnya menjadi kebanggaan mereka (Gambar No.13 s/d No. 16).



Gambar No. 13: Kantor Bupati Rokan Hilir, Riau, Sumatera
(Sumber: wawasanriau.com)



Gambar No. 14: Kantor Bupati Kepahiang, Bengkulu, Sumatera
(Sumber: mediakepahiang.com)



Gambar No. 15: Kantor Bupati Banggai, Luwuk, Sulawesi Tenggara
(Sumber: indoplaces.com)



Gambar No. 16: Kantor Gubernur dan DPRD Gorontalo, Sulawesi
(Sumber: yenzay90.blogspot.com)

Sejarah arsitektur Indonesia di masa depan harus lebih berkembang ke arah sejarah sosial dan budaya alih-alih sejarah politik, dan ke arah sejarah lokal alih alih sejarah nasional. Tidak ada sistem atau posisi epistemologis tunggal yang mampu secara efektif dan inklusif membawa kemajuan pada sejarah arsitektur Indonesia. Kita tidak boleh lagi melakukan interpretasi historis secara monolitik. Kita harus mendemokratisasikan sejarah dengan membuka seluas-luasnya perspektif dan sudut pandang yang heterogen terhadap suatu subyek historis, dan membuka ruang bagi interpretasi tandingan.

Untuk menghindari kategori yang mengarah pada homogenisasi yang dilakukan oleh agen pemerintah, dan mendorong ditemukannya kembali alternatif-alternatif yang bermakna, Nordholt menyarankan untuk menolak gagasan sentralitas negara sebagai sumber tunggal bagi legitimasi dokumentasi sejarah, dengan mendorong pencarian pluralitas

suara dan perspektif. Yang dijadikan sasaran bukanlah sejarah Indonesia yang tunggal, melainkan sejarah sebagai hasil interaksi yang kompleks antara varian sejarah-sejarah Indonesia, yang menyertakan berbagai kelompok masyarakat yang tersisih dari naratif resmi^{lx}.

Indonesia tidak merepresentasikan tradisi budaya yang homogen. Tiap kelompok etnik memiliki warisan budaya dan arsitekturnya sendiri. Sangatlah masuk akal, jika sejarah arsitektur Indonesia berusaha menelusuri jejak sejarah berbagai kelompok etnik yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia, dan mengkaji bagaimana masa depan dapat dibayangkan dalam rona lokal dan regional tertentu. Dengan demikian, etnisitas tidak lagi dipandang sebagai benda statis, tetapi sebagai suatu proses, suatu fenomena dinamis yang harus dipahami dalam konteksnya yang khusus.

Namun Nordholt juga mengingatkan, meski upaya untuk mengumpulkan dan menciptakan sumber-sumber baru terjadi pada konteks regional, upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan identitas etnik dan regional yang baru. Upaya tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada rakyat Indonesia yang hidup di belahan dunia lain tentang pengalaman dari saudara-saudara sebangsanya^{lx}.

Seorang skolar arsitektur idealis Galih Wijil Pangarsa mengusulkan agar dilakukan rekontekstualisasi konsep Arsitektur Nusantara sebagai bidang studi (*field of study*). Pengertian Arsitektur Nusantara jangan lagi dibatasi hanya pada fenomena arsitektur yang hadir dalam teritori negara Indonesia saja, tetapi harus mencakupi ruang budaya dan geografis di luar itu (misalnya Asia Tenggara)^{lxi}. Setiap arsitektur etnik harus diperlakukan

sebagai entitas unik yang memiliki kespesifikan lokal, stratum geologis dan dinamika historis yang berbeda. Sejarawan harus melaksanakan observasi-makro untuk dapat mengidentifikasi sistem dan struktur secara induktif, dan pada waktu yang bersamaan melakukan observasi-mikro untuk menggali detilnya secara deduktif. Konsep Arsitektur Nusantara dengan demikian harus ditempatkan pada ruang yang lebih luas, rentang temporal dan *geohistory* yang lebih panjang^{lxiii}. Dengan demikian studi Arsitektur Nusantara akan mampu mengidentifikasi secara sistematis kearifan lokal sebagai basis untuk referensi konseptual dan implementasi dalam menyelesaikan masalah arsitektural yang dihadapi oleh rakyat Indonesia pada saat sekarang^{lxiii}.

Upaya re-indigenisasi sejarah arsitektur Indonesia tampak jelas dalam gagasan pemikiran Josef Prijotomo tentang Arsitektur Nusantara^{lxiv}, yang menuntut agar Arsitektur Nusantara didudukkan setara dengan arsitektur Barat, dan dipahami menggunakan tatapikir (*mindset*) tersendiri yang berbeda dengan tatapikir Barat. Pemahaman tentang Arsitektur Nusantara menurut Prijotomo harus didasarkan pada dua kenyataan, yaitu: 1) kenyataan geoklimatik (kepulauan dan tropik lembab), dan 2) kenyataan tradisi tanpa tulis, di mana pengetahuan diwariskan melalui praktik budaya seperti adat, sistem kepercayaan, pandangan dunia (*worldview*), upacara, dan artefak, sebagai keeping-keeping perekam pengetahuan arsitektur^{lxv}. Meski demikian, tidak berarti bahwa lingkungan binaan yang dihasilkan tradisi tanpa tulis lebih inferior bila dibandingkan dengan masyarakat bertradisi tulis atau masyarakat modern masa kini.

Konsep Arsitektur Tradisional dan Arsitektur Nusantara menurut Prijotomo merujuk pada obyek yang sama, yaitu karakteristik arsitektur berbagai etnisitas di Indonesia. Namun kedua konsep tersebut merepresentasikan dua cara membangun pengetahuan yang berbeda. Pengetahuan arsitektur tradisional dibangun dalam disiplin antropologi yang mendasarkan pemahamannya pada arsitektur sebagai cerminan budaya, sementara pengetahuan Arsitektur Nusantara dibangun dalam disiplin arsitektur yang mendasarkan pemahamannya pada arsitektur dari tradisi^{lxvi}. Menurut Prijotomo konsep Arsitektur Tradisional terlalu didominasi oleh pengetahuan antropologi, sehingga tidak dilengkapi dengan pengetahuan untuk “menciptakan” arsitektur yang berlandas pada arsitektur tradisional tersebut, dan tidak mampu menampilkan citra Arsitektur Nusantara. Pertanyaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun pengetahuan Arsitektur Nusantara adalah “Apa yang telah diberikan oleh Arsitektur Nusantara kepada masyarakat Nusantara?”, “Pengetahuan apa yang diperoleh disiplin arsitektur dari Arsitektur Nusantara?”^{lxvii}.

VIII. PENUTUP

Wacana tentang sejarah arsitektur Indonesia hingga saat ini telah dikembangkan secara arbitrer menurut beberapa kategori, yaitu: 1) Periode historis (Pra-Hindu Budha, Hindu Budha, Islam, Kolonial, Pasca Kemerdekaan), 2) Wilayah geografis (contoh: Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan), 3) Kelompok etnik (contoh: Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau), dan 4) Gaya stilistik (contoh: Tradisional, Art Deco, Indo-

eropa, Modern, Jengki, Pascamodern). Tidak bisa dipungkiri, bahwa sejarah arsitektur Indonesia belum mampu menanggalkan warisan epistemologi kolonial yang membawa banyak distorsi dalam konseptualisasi, proses dan produksi pengetahuan arsitektur di Indonesia.

Historiografi arsitektur di Indonesia selama ini gagal membangun wacana yang relevan dan berkeadilan, antara lain karena cenderung terpusat pada kelompok etnik dominan yang dianggap memiliki nilai budaya tinggi, melampaui nilai budaya etnik-etnik lain yang tergolong minoritas. Cara pandang ini di satu sisi membawa efek banalitas pada studi kelompok etnik dominan dan wilayah geografis tertentu (contoh: Jawa dan Bali) yang dicirikan oleh *over-repetition* tanpa kebaruan (*novelty*) yang berarti, di sisi lain membawa efek pembungkaman (*silence*) pada studi etnik minoritas atau wilayah geografis terpencil, sehingga tidak pernah memiliki kesempatan untuk diangkat ke permukaan. Perhatian para cendekia pada periode kesejarahan arsitektur di Indonesia juga tidak merata, karena berbagai hambatan berupa obsesi terhadap periode tertentu, kelangkaan sumber literatur dan empiris, hambatan linguistik, keterbatasan rentang waktu, anggaran penelitian, dan sebagainya. Konsekuensi logis dari orientasi distortif ini adalah kondisi ketimpangan dan disorganisasi yang terjadi dalam khasanah pengetahuan kesejarahan arsitektur di Indonesia.

Untuk mengatasi hambatan epistemologis, menegakkan prinsip relativitas budaya, serta mendorong produksi pengetahuan sejarah arsitektur yang berkeadilan, langkah alternatif yang bisa ditempuh adalah

dengan mengembangkan perspektif, kerangka dan tujuan studi kesejarahan arsitektur yang bersifat lintas lokal/regional, ruang, waktu, dan budaya, serta mampu merangkul fenomena keberagaman dan kompleksitas kehidupan masyarakat di bumi Indonesia, serta menerapkan strategi resistansi atau perlawanan terhadap gejala *centering* dan *homogenization* yang prevalen, menuju pada *de-centering* dan *diversification* dalam produksi pengetahuan sejarah arsitektur di Indonesia. Skolar tidak lagi terfokus pada obyek arsitektural, tokoh, aspek formal, kronologi, kesamaan dan kontinuitas semata, tetapi pada perbedaan dan keragaman masalah kehidupan manusia dan solusi arsitekturalnya.

Historiografi arsitektur Indonesia jelas tidak bisa berpegang pada suatu posisi atau cara pandang yang tunggal. Kita dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan mengembangkan sejarah arsitektur Indonesia sebagai suatu disiplin (*Indonesian architectural history*) yang otonom berlandaskan prinsip keilmiah, atau sebagai narasi historis (*history of Indonesian architecture*) monolitik berlandaskan pada motivasi politik identitas. Pilihan pertama bersifat sangat terbuka, fleksibel dan akomodatif, dapat dipahami sebagai studi kesejarahan dari keseluruhan fenomena arsitektural yang hadir dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lahir dari tradisi budaya yang beragam dan tidak membentuk pola yang koheren. Sementara pilihan kedua bersifat ambisius namun problematis, karena cenderung menampilkan gagasan tentang arsitektur Indonesia sebagai entitas yang tunggal dan kohesif, sarat dengan aspirasi dan semangat untuk menemukan identitas keindonesiaan yang absolut. Sayangnya wacana tentang arsitektur

Indonesia yang berkembang dalam domain kesejarahan arsitektur dan praktik arsitektur di Indonesia hingga saat ini sangat didominasi oleh cara pandang yang kedua.

Tantangan utama yang dihadapi historiografi arsitektur di Indonesia pada saat ini adalah bagaimana mengorganisasikan kepingan pengetahuan dan fakta sejarah arsitektur dari masa lampau hingga masa kini yang berserak dengan kualitas yang beragam, menjadi pengetahuan terkodifikasi yang koheren, sistematis dan terpadu, sehingga layak untuk ditransmisikan dan didesiminasikan sebagai bagian dari wacana ilmiah dan intelektual serta kurikulum pendidikan arsitektur di Indonesia. Masalah selanjutnya adalah bagaimana mentransformasikannya ke dalam suatu narasi historis yang memenuhi kaidah keilmiah, komprehensif, memiliki daya pikat bagi pembaca serta pembelajar, serta bermanfaat bagi pelaku keprofesian di bidang arsitektur dan masyarakat umum.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor ITB dan jajarannya atas semua dukungan yang diberikan selama saya mengabdikan diri di ITB, juga kepada Pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang terhormat ini.

Dengan tulus saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para promotor yang telah memberikan rekomendasi dalam proses kenaikan jabatan fungsional Guru Besar, yaitu: Prof.Dr. Emeritus Mohammad Danisworo, Prof.Dr. Emeritus Djoko Sujarto, Prof.Dr. Setiawan Sabana, Prof. Dr. Enri Damanhuri, Prof. Dr. Ofyar Z. Thamin.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dekan SAPPK ITB dan jajarannya yang telah membantu, mendukung dan memberikan dorongan semangat dalam proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar, juga kepada seluruh komunitas Arsitektur ITB (rekan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) atas kerjasamanya dalam pelaksanaan tugas akademik S1, S2, dan S3 di lingkungan program studi Arsitektur. Saya sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua dosen senior Arsitektur ITB yang telah membimbing dan mengarahkan perkembangan karier saya, terutama para mentor di kelompok keahlian Sejarah, Teori dan kritik Arsitektur, yaitu Ir. Zainuddin Kartadiwiria, M.Arch, Dr. Yuswadi Saliya, Dr. Sri Rahayu BUK.

Saya sampaikan ungkapan terima kasih dan hormat kepada kedua orang tua saya, bapak Gatot Sudradjat (almarhum) dan ibu Ina Kumala, yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah membimbing saya, juga kepada seluruh anggota keluarga dan kerabat atas dukungan semangat yang diberikan selama ini.

Doa dan restu saya mohonkan dari semua pihak, agar saya dapat melaksanakan amanah sebagai Guru Besar dengan penuh tanggung jawab, demi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia pada umumnya,

dan kebaikan ITB pada khususnya. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan berkat dan rahmatNya yang berlimpah. Amin.

REFERENSI

- i Conal Furay dan Michael J. Salevouris, *The Methods and Skills of History: A Practical Guide*, 2nd ed (Harlan Davidson, 1988), 223.
- ii Donald V. Gawronski, *History: Meaning and Method* (Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1969), 59-60.
- iii Bob Joseph (2017), [Http://www.ictinc.ca/blog/a-brief-definition-of-colonization-and-indigenization](http://www.ictinc.ca/blog/a-brief-definition-of-colonization-and-indigenization), diunduh 9 oktober 2017.
- iv Michel Foucault, *Power-Knowledge*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980).
- v Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1979).
- vi Naskah orasi ilmiah ini merupakan pengembangan lanjut dari artikel: Iwan Sudradjat (2015), "In Search of Epistemic Principles for the Study of Indonesian Architectural History", yang dipresentasikan pada 1st SEAARC Symposium: *Questions in Southeast Asia's Architecture / Southeast Asia's Architecture in Question*, Southeast Asia Architecture Research Collaborative, NUS, Singapore, 08-10 January 2015.
- vii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 29.
- viii F.W. Stapel (ed.), *Geschiedenis van Nederlans-Indië*. 5 dln. (Amsterdam: Joost van den Vondel, 1938-1950).

- ix Husein Djajadiningrat, *Critische Beshouwingen van de Sejarah Banten. Bijdrage ter Kenschering van de Javaansche Geschiedschrijving* (Haarlem: Joh. Enschede en Zonen, 1913)
- x B. Schrieke, *Indonesian sociological studies: Ruler and realm in early Java* (The Hague/Bandung: Van Hoeve, 1957; J.C. Van Leur, Indonesian Trade and Society (The Hague/Bandung, 1955), W.F. Wertheim, *Indonesian society in transition: A study of social change* (The Hague: W. van Hoeve, 1956).
- xi Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 51, 53, 55.
- xii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 13.
- xiii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 14.
- xiv Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 15.
- xv Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 1982/2014), 39.
- xvi Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 1982/2014), 6.
- xvii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 14.
- xviii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 56, 58.

- xix Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 1982/2014), 6, 8.
- xx Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 1982/2014), 35.
- xxi Kuntowijoyo, "Indonesian historiography in search of identity", *Humaniora*, 12, no.1 (2000):79-85.
- xxii Bambang Purwanto, "Historisisme Baru dan kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis terhadap Historiografi Indonesia", *Humaniora*, Vol. 13, no. 1, 2001, pp 29-44; Bambang Purwanto, "Reality and Myth in Contemporary Indonesian History", *Humaniora*, 13, no. 2, 2001, pp. 111-123; Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005); Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!?* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006).
- xxiii Bambang Purwanto, "Reality and Myth in Contemporary Indonesian History", *Humaniora*, 13, no. 2, (2001):116.
- xxiv Bambang Purwanto, "Reality and Myth in Contemporary Indonesian History", *Humaniora*, Vol.13, no. 2, (2001):120.
- xxv Bambang Purwanto, "Reality and Myth in Contemporary Indonesian History", *Humaniora*, 13, no. 2, (2001):120
- xxvi Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), 1-2.
- xxvii Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!?* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006), v.

- xxviii Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), 37-38.
- xxix Iwan Sudradjat, *A Study of Indonesian Architectural History*, PhD Dissertation, the University of Sydney, 1991.
- xxx Stuart Hall, "When Was the 'Post-Colonial'? Thinking at the Limit", in Iain Chambers and Lidia Curti eds., *The Post-Colonial Question: Common Skin, Divided Horizons* (London: Routledge, 1996), 247.
- xxxi "Epistemology is the theory of knowledge, which includes the conception of the nature of knowledge, the means used to gain knowledge, the criteria for the assessment of the validity of knowledge, the purpose of the pursuit of knowledge, and the role that knowledge plays in human existence". Molefi Kete Asante and Ama Mazama, *Encyclopedia of Black Studies*, (Thousand Oaks, CA: SAGE Reference, 2005), 39. "As such, different epistemic (knowledge) traditions should be expected to develop diverse trajectories of knowing and constructing select bodies of knowledge". Ali A. Abdi, "Eurocentric Discourses and African Philosophies and Epistemologies of Education: Counter-Hegemonic Analyses and Responses", *International Education*, 36, no.1 (Fall 2006): 16.
- xxxii Untuk uraian rinci tentang warisan tradisi antropologi dan arkeologi kolonial dalam sejarah arsitektur Indonesia, lihat: Iwan Sudradjat, *A Study of Indonesian Architectural History*, PhD Dissertation, the University of Sydney, 1991.
- xxxiii J.C. van Eerde, *A Review of the Ethnological Investigations in the*

Dutch Indian Archipelago (Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1923), 15.

- xxxiv Roy F. Ellen, "The Development of Anthropology and Colonial Policy in the Netherlands: 1800-1960", *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 12 (1976): 320.
- xxxv Marieke Bloembergen and Martijn Eickhoff, "Conserving the past, mobilizing the Indonesian future: Archeological sites, regime change and heritage politics in Indonesia in the 1950s", *BKI* 167, no. 4 (2011): 408.
- xxxvi Untuk uraian rinci, lihat: A.J. Bernet Kempers, "The Archeological Service in Indonesia", *The Journal of the Polynesian Society*, 58, no. 4 (1949): 185-92.
- xxxvii Reimar Schefold, "The Domestication of Culture: Nation-building and Ethnic Diversity in Indonesia", *BKI* 154, no. 2 (1998): 263.
- xxxviii Untuk uraian rinci tentang pengaruh politik rezim kekuasaan dan pengetahuan Orde Baru dalam sejarah arsitektur Indonesia, lihat: Iwan Sudradjat, *A Study of Indonesian Architectural History*, PhD Dissertation, the University of Sydney, 1991.
- xxxix Benedict R.O.G. Anderson, "Cartoon and Monuments: the Evolution of Political Communication Under the New Order", in Karl D. Jackson and Lucian W. Pye eds., *Political Power and Communications in Indonesia*, (University of California Press, 1978): 311.
- xl Iwan Sudradjat (2008), "How to do the History of Indonesian Architecture: A Foucauldian Project", *Journal of Southeast Asian*

Architecture, 11: 42-43.

- xli Bob Joseph (2017), [Http://www.ictinc.ca/blog/a-brief-definition-of-colonization-and-indigenization](http://www.ictinc.ca/blog/a-brief-definition-of-colonization-and-indigenization), diunduh 9 oktober 2017.
- xlii Henk Schulte Nordholt, "De-colonising Indonesian Historiography", paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies, public lecture series "Focus Asia", 25-27 May 2004, Lund University, Sweden: 17.
- xliii George Dei, "African development: The relevance and implications of 'Indigenusness'", in G. Dei, B. Hall & D.G. Rosenberg eds., *Indigenous knowledges in global contexts: Multiple readings of our world* (Toronto: University of Toronto Press, 2000), 27.
- xliv Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 1982/2014), 26.
- xlv Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 86.
- xlvi Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 27.
- xlvii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 73.
- xlviii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 37.
- xlix Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 87.

- l Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 96.
- li Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 43. Sartono merujuk pada B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia* (Jakarta, 1962).
- lii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 87.
- liii Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 87.
- liv Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 87.
- lv Bambang Purwanto, "Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik in Menggugat Historiografi Indonesia" dalam Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam eds, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005): 32-33, 37.
- lvi Bambang Purwanto, "Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik in Menggugat Historiografi Indonesia" dalam Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam eds, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005): 26-27.
- lvii Bambang Purwanto, "Membincangkan Kembali Historiografi Indonesiasentris, Sebuah Pemikiran Awal", *Konferensi Nasional Sejarah* ke 9, 5-7 Juli 2011, Jakarta: 1.
- lviii Bambang Purwanto, "Membincangkan Kembali Historiografi

- Indonesiasentris, Sebuah Pemikiran Awal", *Konferensi Nasional Sejarah* ke 9, 5-7 Juli 2011, Jakarta: 1-2.
- lix Henk Schulte Nordholt, "De-colonising Indonesian Historiography", paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies, public lecture series "Focus Asia", 25-27 May 2004, Lund University, Sweden: 15.
- lx Henk Schulte Nordholt, "De-colonising Indonesian Historiography", paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies, public lecture series "Focus Asia", 25-27 May 2004, Lund University, Sweden: 17.
- lxi Galih Widjil Pangarsa, *Merah Putih Arsitektur Nusantara* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006): 1, 4.
- lxii Galih Widjil Pangarsa, *Merah Putih Arsitektur Nusantara* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006): 5, 6.
- lxiii Galih Widjil Pangarsa, *Merah Putih Arsitektur Nusantara* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006): 8.
- lxiv Josef Prijotomo, Apa itu Arsitektur Nusantara? (sebuah reorientasi pengetahuan arsitektur tradisional), <http://www.onopo.id/2017/02/apa-itu-arsitektur-nusantara.html>, diunduh 11 Oktober 2017.
- lxv Josef Prijotomo, Apa itu Arsitektur Nusantara? (sebuah reorientasi pengetahuan arsitektur tradisional), <http://www.onopo.id/2017/02/apa-itu-arsitektur-nusantara.html>, diunduh 11 Oktober 2017.
- lxvi Josef Prijotomo, "Arsitektur Nusantara: Arsitektur Perteduhan

Dan Arsitektur 'Liyani.' Pembacaan Arsitektural Atas Arsitektur Masyarakat Tanpa Tulisan." (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Institut Teknologi 10 November, 19 April 2008)

Ixvii Josef Prijotomo, *Nusantara Architecture as Tropical Architecture* (Surabaya, ITS Press, 2010), 6-8.

CURRICULUM VITAE



Nama : **IWAN SUDRADJAT**
Tmpt. & tgl. lhr. : Bandung, 27 Desember 1952
Alamat kantor : KK Sejarah, Teori dan
Kritik Arsitektur
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan,
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10, Bandung 40132
Gedung Labtek IXB, Arsitektur

Telepon : (022) 2504962
Fax : (022) 2530705
Email : iwansudr@ar.itb.ac.id; iwansudr@gmail.com
Website : <http://dosen.ar.itb.ac.id/iwansudradjat>

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1991: Doctor of Philosophy, Department of Architecture, University of Sydney, Australia.
Judul tesis: "A Study of Indonesian Architectural History".
2. 1984: Magister Teknik Arsitektur, Fakultas Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.
Judul tesis: "Struktur Pemahaman Lingkungan Perkotaan".
3. 1978: *Diploma in Urban Social Development*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, bekerjasama dengan The Institute of Social Studies, The Hague.

- 1977: Sarjana Teknik Arsitektur, Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Bandung

RIWAYAT PEKERJAAN

- 1978 : Dosen Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP ITB
- 1992–1995 : Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP ITB
- 1995–1998 : Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP ITB
- 1998–2001 : Ketua Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP ITB
- 2002–2005 : Direktur Operasional Yayasan LAPI ITB
- 2002–2005 : Anggota Senat Akademik ITB
- 2006–2010 : Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
- 2011–2014 : Anggota Senat Akademik ITB
- 2015–2019 : Sekretaris Senat Akademik ITB

RIWAYAT KEPANGKATAN

- CPNS, III/A 1 Maret 1979
- Penata Muda, III/A 1 Januari 1981
- Penata Muda TK 1, III/B 1 Oktober 1982
- Penata, IIIC 1 Oktober 1984
- Penata TK 1, III/D 1 April 1993
- Pembina, IV/A 1 Oktober 1996
- Pembina TK 1, IV/B 01 April 2017

RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

- Asisten Ahli Madya 01 Maret 1979

- Asisten Ahli 1 Oktober 1982
- Lektor Muda 1 April 1988
- Lektor Madya 1 Januari 1993
- Lektor (Impassing) 1 April 1997
- Lektor Kepala 1 Januari 2001
- Profesor/Guru Besar 1 Oktober 2016

RIWAYAT KEPROFESIAN

- 2011–2015 : Technical Consultant for Architectural Design, JICA – ITB Development Projects.
 - Center for Advance Sciences
 - Center for Research and Community Service
 - Center for Art, Design and Languages
 - Center for Infrastructure and Built Environment Engineering
- 2010 : Juri Sayembara Desain Arsitektur “Ikatan Alumni ITB Tower”, Ikatan Alumni ITB, Jakarta 22 Desember.
- 2010 : Juri Sayembara Desain Arsitektur “Development of Bandung Institute of Technology III”. Bandung, 2 Maret.
 - Center for Advance Sciences
 - Center for Research and Community Service
 - Center for Art, Design and Languages
 - Center for Infrastructure and Built Environment Engineering.
- 1993-2002 : OECF / JBIC – ITB Development Projects:
Planning and Design Officer:
 - Labtek V, VI, VII, VIII, IXA, IXB, IXC, X, XI
 - Science, Technology and Art Centre

- c) Centre for Computer and Academic Records
 - d) Basic Science Center A&B
- Construction Officer:
- a) Labtek X
 - b) Centre for Computer and Academic Records (CCAR)
 - c) Basic Science Center A & B

RIWAYAT DALAM ORGANISASI PROFESI/MASYARAKAT KEILMUAN

1. Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia (LSAI)
2. Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)

PENGHARGAAN

1. 2016 : “Penghargaan Pengabdian 35 Tahun Institut Teknologi Bandung”
Institut Teknologi Bandung, 17 Agustus.
2. 2016 : “Penghargaan Institut Teknologi Bandung Bidang Pengajaran”
Institut Teknologi Bandung, 02 Maret.
3. 2015 : “Satyalancana Karya Satya XXX Tahun”
Presiden Republik Indonesia, 11 Agustus.
4. 2011 : “Ganesa Wira Adiutama”
Institut Teknologi Bandung, 28 Februari.
5. 2004 : “Penghargaan Pengabdian 25 Tahun Institut Teknologi Bandung”
Institut Teknologi Bandung, 19 Agustus.

6. 1999 : Pemenang Pertama Lomba Penulisan Teori Arsitektur “Membangun Sistem Teori Arsitektur Nusantara: Mengubah Angan-angan menjadi Kenyataan”. Lomba Karya Tulis Teori Arsitektur dan Simposium Nasional Teori Arsitektur: Menyikapi Alih Abad Milenium Baru Arsitektur Nusantara. Bandung: Unika Parahyangan, 1 April.
7. 1997 : “Satyalancana Karya Satya X Tahun”
Presiden Republik Indonesia, 12 Maret.

PUBLIKASI

Bab dalam Buku

1. **Iwan Sudradjat** (2015), excerpt from PhD Thesis “ A Study of Indonesian Architecture”, in Imelda Akmal (ed), *Indonesia: Architectural Guide*, DOM Publishers and IMAJI, 2015
2. **Iwan Sudradjat** (2011), “Perempuan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna”, in Ismi D.A. Nurhaeni et al (ed), *Pergeseran Paradigma Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarusutamaan Gender*, Surakarta: Cakra Books in collaboration with P3G LPPM Universitas Sebelas Maret. ISBN: 979-978-3456-84-5.
3. **Iwan Sudradjat** (2010), “Teknik Penulisan Sejarah”, in *Buku 1: Sejarah, Teori dan Kritik Arsitektur*, KK STK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. ISBN 978-979-25-0423-1.
4. **Iwan Sudradjat** (2010), “Metode Alternatif Pengajaran Sejarah Arsitektur: Studi Preseden dan pendekatan Sistem”, in *Buku 1: Sejarah, Teori dan Kritik Arsitektur*, KK STK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. ISBN 978-979-25-0423-1.
5. **Iwan Sudradjat** (2010), “The Leiden School of Structural

Anthropology: Contribution to the Study of Traditional Architecture of Indonesia”, in *Buku 1: Sejarah, Teori dan Kritik Arsitektur*, KK STK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. ISBN 978-979-25-0423-1.

6. **Iwan Sudradjat** (2005), “Contemporary Architecture in Indonesia (1950s-1990s): a Brief Historical Survey”, introductory chapter In Imelda Akmal, *Indonesian Architecture Now*, Jakarta: Borneo Publications. ISBN 979-99472-0-0

Jurnal Internasional

1. Besta Besuki Kertawibawa, **Iwan Sudradjat** (2017), “The Influence of Dutch Colonialism on Traditional Houses in Kabupaten Subang, West Java, Indonesia”, *Journal of Applied Environment and Biological Sciences (JAEBS)*, (Thomson Reuter ISI Indexed), Vol. 7, No. 5, May.
2. Uray Fery Andi, **Iwan Sudradjat** (2016), “Improvement of Riverbanks and its Effect on Building Configuration. Case Study: Malay Sultanate Palaces in West Kalimantan, Indonesia”. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)*, (Thomson Reuters ISI Indexed), Vol.6, No. 8, August.
3. Andi Harapan, **Iwan Sudradjat**, Basauli U. Lubis, Indra B. Syamwil (2010), “Assessing and Optimizing the Technical Life of Architectural Components of Low-Cost Multistoried Rental Housing in Jakarta”, *Journal of Civil Engineering and Architecture*, Vol.4, No.9, September. David Publishing Company.
4. **Iwan Sudradjat** (2008), “How to Do the History of Indonesian Architecture: A Foucauldian Project”, *Journal of Southeast Asian Architecture*, Vol. 11, December, the Department of Architecture,

National University of Singapore. ISSN: 0218-9593.

Jurnal Nasional

1. **Iwan Sudradjat**, Bambang Triyoga (2016), “Segregasi Gender dalam Organisasi Spasial Pesantren-Pesantren Besar di Pulau Jawa”, *Journal of Regional and City Planning*, Vol.27, No2, August.
2. Juhana Said, **Iwan Sudradjat** (2013), “Pemanfaatan Potensi Iklim Makro Daerah Pantai untuk perbaikan Iklim Mikro pada Lingkungan Binaan di Kota Makassar”, *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, Vol.2, No. 1, Januari.
3. Bambang Triyoga, **Iwan Sudradjat**, Rini Raksadjaja, Ismet B. Harun (2010), “Perubahan Teritorial Pesantren-pesantren Besar di Jawa Periode 1900-2007”, *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol.8, No.1, Juni, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. ISSN: 1410-6094.
4. **Iwan Sudradjat**, Sugeng Trijadi, Andi Harapan (2010), “Perkembangan Tipologi Rumah Vernakular dan Responnya terhadap Bahaya Gempa. Studi Kasus: Desa Duku Ulu, Bengkulu”, *Jurnal Permukiman*, Vo. 5, No. 3, November. Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian PU, Bandung. ISSN: 1907-4352.
5. Sugeng Triyadi, **Iwan Sudradjat**, Andi Harapan (2010), “Tingkat Vulnerabilitas dan Kapasitas Rumah Vernakular Rurukan di Minahasa terhadap Gempa”, *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol.8, No.2, Desember, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. ISSN: 1410-6094.
6. Andi Harapan, **Iwan Sudradjat**, Basauli U. Lubis, Indra B. Syamwil

(2010), "Pola Kerusakan dan Kinerja Fisik Komponen Atap pada Bangunan Rumah Susun Sederhana di DKI Jakarta", *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol.8, No.2, Desember, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. ISSN: 1410-6094.

7. **Iwan Sudradjat** (2001), "Pendekatan dan Analisis Gender dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Integrasinya ke dalam Pendidikan dan Pengajaran di Perguruan Tinggi", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.6, No.1, Februari, Akatiga, Bandung. ISSN: 1411-0024.
8. Surya Dharma, **Iwan Sudradjat** (2001) , "Pengembangan Sistem Informasi Ipteks dan Strategi Penelitian", *Jurnal Pengembangan dan Penerapan Teknologi*, Vol. II, No. 5, Direktorat P3M, Ditjen Dikti, Depdiknas.
9. **Iwan Sudradjat** (1995), "Dekonstruksi: Tinjauan Retrospektif", *Majalah Sketsa*, 11 Maret. ISSN: 0853-1226.

Seminar Internasional

1. Tony Sofian, **Iwan Sudradjat**, Baskoro Tedjo (2016), "Sensible Architecture: Bamboo Eco Tourism and Community Development in Indonesia. Case Study: Ubud Bali & Tentana Poso", *Proceeding of Artepolis International Conference 6: Imagining Experiences: Creative Tourism and The Making of Place*. School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung, Bandung 4-5 August.
2. Juarni Anita, **Iwan Sudradjat** (2015), "Housing Adjustment as a Response to Flood and Land Subsidence in Muara Angke, North Jakarta", *Proceedings of 2015 TAU Conference: Mitigating and Adapting Built Environments for Climate Change in the Tropics*. School of

Architecture, Tanri Abeng University, Jakarta, 30-31 March 2015. Network for Comfort and Energy Use in Buildings: <http://www.nceub.org.uk>.

3. **Iwan Sudradjat** (2015), "In Search of Epistemic Principles for the Study of Indonesian Architectural History", Invited Speaker, 1st *SEAARC Symposium: Questions in Southeast Asia's Architecture / Southeast Asia's Architecture in Question*, *Southeast Asia Architecture Research Collaborative*, NUS, Singapore, 08-10 January.
4. Widya Suryadini, **Iwan Sudradjat**, I. Bambang Sugiharto and Yasraf Piliang (2014), "Suspended Between Heaven and Earth: The Interiority of Airport as Liminal Space", *[in]arch International Conference 2014*, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, Depok, 10-11 September 2014.
5. Martin L. Katoppo, **Iwan Sudradjat** (2014), "Combining Participatory Action Research (PAR) and Design Thinking (DT) as an Alternative Research Method in Architecture", *Proceedings 5th Arte Polis International Conference and Workshop: Reflection on Creativity: Public Engagement and the Making of Place*, ITB, Bandung.
6. **Iwan Sudradjat** (2012), "Conceptualizing A Framework for Research on Place in Indonesia", Main Speaker, *Proceedings International Seminar on Place Making and Identity*, Universitas Pembangunan Jaya, Jakarta, 26-27 September. ISBN: 978-602-18815-0-7.
7. Besta Besuki Kertawibawa, **Iwan Sudradjat** (2012), "Spatial Creativity: Rural Houses of Migrant Workers in Kabupaten Subang", *Proceedings International Conference Artepolis 4: Creative Connectivity and the Making of Place*, School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung, 5-7 July 2012. ISBN: 978-

8. Dhini Dewiyanti, **Iwan Sudradjat** (2012), "The Effects of Ornaments in the Interior Space of Mosque on the Level of Concentration of Its Congregations", *First International Conference on Islamic Built Environment*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) in collaboration with International Islamic University Malaysia (IIUM), Bandung, 28-29 March.
9. **Iwan Sudradjat** (2011), "Foucault, the Other Space, and Human Behaviour", Keynote Speaker, *Proceedings Asean Conference on Environment-Behaviour Studies 2011*, Center for Environment-Behaviour Studies, FAPS, Universiti Teknologi MARA, Malaysia in Collaboration with ABRA, AMER and SAPPK ITB, Bandung 15-17 June. ISSN: 978-967-363-227-5. [Also in ELSEVIER, *Procedia: Social Behavioral Science*, Vol. 36, 2012, pp. 28-34.].
10. Juhana Said, **Iwan Sudradjat** (2009), "The Dwelling Culture of Bajo People: from Boat to Sedentary House", *Proceedings International Conference on Engineering, Environment, Economic, Safety and Health*, Faculty of Engineering, Sam Ratulangi University, Manado, 26-27 October. ISSN: 978-979-17589-7-4.
11. **Iwan Sudradjat** (2002), "Rethinking Architectural Education in Indonesia: in Search for Sense of Purpose and New Paradigm", *Journal of South-East Asian Architecture (JSEAA) Symposium*, Center for Advanced Studies in Architecture (CAS), Department of Architecture, School of Design and Environment, National University of Singapore, 15-16 March.

Seminar Nasional

1. **Iwan Sudradjat** (2016), "Membangun Teori Lokal melalui *Grounded Theory*", *Forum Dialog Arsitektur: "Membangun Teori Arsitektur Lokal"*, Universitas Parahyangan, Bandung 10.
2. **Iwan Sudradjat** (2016), "Penelitian Kualitatif dalam Disertasi Arsitektur", *Forum Diskusi IV Metodologi Penelitian Disertasi Arsitektur*, Kerjasama Universitas Parahyangan Bandung dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 19-20 Mei.
3. **Iwan Sudradjat** (2014), "Konsep Indonesia dalam Wacana dan Praktik Berarsitektur: Dari Doktrin Ideologis Menuju Konstruksi Teoretis", *Seminar Nasional Arsitektur Merah Putih: Ruang dan Tempat dalam Latar Indonesia*, Unika Duta Wacana, Yogyakarta, 23 Mei.
4. **Iwan Sudradjat** (2011), "History of Architecture in Architectural Education: Indonesian Experience", *Seminar dan Lokakarya Sejarah Arsitektur dalam rangka Pameran "Dua Arsitektur Jerman 1949-1989"*, Goethe Institute bekerjasama dengan SAPPK ITB, LSAI, APTARI, Campus Center ITB, Bandung, 17 September.
5. Sugeng Triyadi, **Iwan Sudradjat**, Andi Harapan (2010), "*Indigenous Knowledge* sebagai Sumber Kreativitas Arsitektur Masyarakat Tonselama di Minahasa", *Prosiding Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri (RAPI) ke IX: Pengembangan Teknologi dan Potensi Energi untuk Kesejahteraan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 4 Desember. ISBN: 1412-9612.
6. Sugeng Triyadi, **Iwan Sudradjat**, Andi Harapan (2010), "Tipologi Hunian dan Teknologi Membangun pada Masyarakat Jawa Tondano", *Prosiding Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri (RAPI) ke IX: Pengembangan Teknologi dan*

- Potensi Energi untuk Kesejahteraan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 4 Desember. ISBN: 1412-9612.
7. **Iwan Sudradjat** (2010), "Membangun Budaya Studio yang Efektif: Lessons Learned", *Prosiding Seminar Nasional 60 Tahun Pendidikan Arsitektur: Pendidikan Arsitektur dan Tantangan Lingkungan Masa Depan*, Program Studi Arsitektur SAPPK ITB, Bandung, 16 Oktober. ISBN: 978-602-97836-1-2.
 8. **Iwan Sudradjat** (2010), "The Use and Abuse of Vernacular Architecture", *Seminar Purnabakti Dr.Ir. Sri Rahayu BUK, MSA dengan tema Arsitektur Vernakular: Potensi dan Permasalahannya*, Prodi Arsitektur, SAPPKITB, 24 April.
 9. **Iwan Sudradjat** (2010), "Epistemologi Humanisme Baru dalam Arsitektur dan Perencanaan Kota", Pembicara Utama, *Prosiding Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan: Serap #1, Humanisme, Arsitektur dan Perencanaan*, FT UGM, Yogyakarta, 16 Januari. ISBN: 978-602-96240-1-4.
 10. Bambang Triyoga, **Iwan Sudradjat**, Rini Raksadjaja, Ismet B Harun (2010), "Perkembangan Ruang Terbuka pada Pesantren-Pesantren Besar di Pulau Jawa Periode 1900-2007", *Prosiding Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan: Serap #1, Humanisme, Arsitektur dan Perencanaan*, FT UGM, Yogyakarta, 16 Januari. ISBN: 978-602-96240-1-4.
 11. **Iwan Sudradjat** (2009), "Peran dan Fungsi Teori dalam Penelitian Arsitektur", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Arsitektur: Metode dan Penerapannya Seri ke-2*, kerjasama Magister Teknik Arsitektur UNDIP dengan IAI Daerah Jawa Tengah, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 16 Mei. ISBN: 978-979-704-747-4

12. Sugeng Triyadi, **Iwan Sudradjat**, Andi Harapan (2009), "Kearifan Lokal pada Bangunan Rumah Vernakular di Bengkulu dalam Merespon Gempa. Studi Kasus: Rumah Vernakular di Desa Duku Ulu", *Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan*, Group Konservasi Arsitektur dan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka, Malang, 7 Agustus. ISBN: 978-979-9488-41-1.
13. **Iwan Sudradjat** (2007), "Teori dan Paradigma Penelitian Arsitektur", *Semiloka Metodologi Arsitektur Berbasis Multimedia*, Unit Koordinasi Pelaksanaan Hibah (UKPH), Universitas Gunadarma, Depok, 12 Juni.
14. Surjamanto Wonorahardjo, **Iwan Sudradjat**, Ketut Wikantika (2006), "Konsep Kajian Lingkungan Termal Kota Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh", *Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Kongres IV Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN)*, Bandung, 13-14 Desember.
15. **Iwan Sudradjat** (2004), "Penataan Sosio-Spasial Berwawasan Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman", *Diskusi Panel Aspek-aspek Penting Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Perumahan dan Permukiman Wilayah Jawa Barat, Jakarta, 30 Januari.
16. **Iwan Sudradjat** (2003), "Penelitian dalam Arsitektur: State of the Art", *Seminar Nasional Penelitian Arsitektur: Metoda dan Penerapannya*, Prodi magister Teknik Arsitektur UNDIP, Semarang, 7 Juni.
17. **Iwan Sudradjat** (1999), "David Harvey tentang Postmodernisme, Akumulasi Fleksibel dan Kompresi Waktu-Ruang", *Simposium Sehari*

Teori Anthony Giddens "Dunia yang Berlari", kerjasama PT Gramedia dan Majalah Basis, Jakarta, 4 Desember.

18. **Iwan Sudradjat** (1999), "Studi Perubahan dalam Sejarah: Teori dan Metoda", *Lokakarya Nasional Pengajaran Sejarah Arsitektur IV*, kerjasama Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Akademi Teknik YKPN, Yogyakarta, 23-24 April.
19. **Iwan Sudradjat** (1999), "Membangun Sistem Teori Arsitektur Nusantara: Mengubah Angan-angan Menjadi Kenyataan", *Prosiding Simposium Nasional Teori Arsitektur: "Menyikapi Alih Abad menuju Milenium Baru Arsitektur Nusantara"*, Laboratorium Sejarah, Teori dan Falsafah Arsitektur, Jurusan Arsitektur FT Unika Parahyangan, Bandung, 1 April.
20. **Iwan Sudradjat** (1999), "Paradigma Penelitian Kajian Wanita dalam Pendidikan dan Pengajaran", *Seminar Kajian Gender dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Pusat Studi Wanita, Lembaga Penelitian IKIP Malang dpm Universitas negeri Malang, Malang, 4 Februari.
21. **Iwan Sudradjat** (1998), "Konsep Gender dan Pembangunan", *Lokakarya Nasional Pengembangan Kajian Wanita di Perguruan Tinggi*, kerjasama Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian UNS dengan Kantor Menteri Negara Peranan Wanita Jakarta, Surakarta, 28-30 Oktober.
22. **Iwan Sudradjat** (1997), "Riset Historis dan Penerapannya dalam Arsitektur", *Lustrum ke 7, 35 Tahun Arsitektur Undip*, Semarang, 5-7 November.
23. **Iwan Sudradjat** (1995), "Kebijaksanaan Pendidikan yang Menjamin Kesamaan Kesempatan Pendidikan bagi Pria dan Wanita", *Lokakarya*

Integrasi Peranan Wanita dalam Perencanaan Pembangunan, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Cipayung, 5 Desember.

24. **Iwan Sudradjat** (1995), "Arsitektur Nusantara: Konstruksi Pengetahuan dan Citra Romantis dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru", *Seminar Arsitektur Nusantara, Keajegan dan Perubahan*, Jurusan Teknik Arsitektur ITS, Surabaya, 9 September.
25. **Iwan Sudradjat** (1995), "Pembinaan Wawasan Gender dalam Penelitian", *Lokakarya Pengelola Pusat Studi Wanita*, Ditbinlitabmas Dikti, Cisarua, Bogor, 22 Agustus.
26. **Iwan Sudradjat** (1995), "Arsitektur Indonesia dalam Kritik: Ditinjau dari Latar Belakang Sejarah dan Perkembangannya", *Simposium Arsitektur Indonesia: Sebuah Tinjauan*. IMARTA, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 3 Juni.
27. **Iwan Sudradjat** (1994), "Perkembangan Teknologi dan Peranan Perempuan: Dampak Teknologi Rumah Tangga", *Seminar Wanita, Teknologi dan Pembangunan*, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita RI dan PPLHITB, Bandung, 20-21 April.
28. **Iwan Sudradjat** (1993), "Filsafat yang Hidup dalam Pendidikan Arsitektur", *Simposium Nasional Pendidikan Arsitektur dan Struktur Kurikulum*, kerjasama Jurusan Teknik Arsitektur ITS dan School of Architecture, University of Manchester, UK, Surabaya, 6-7 Desember.
29. **Iwan Sudradjat**, Sri Rahayu BUK (1993), "Iptek Berwawasan Gender", *Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Peranan Wanita*, Ditbinlitabmas Dikti, Cisarua, Bogor, 25-28 Oktober.
30. **Iwan Sudradjat** (1993), "Menggugat Citra Romantis Budaya dan Arsitektur Tradisional Bali", *Seminar Nasional Perancangan Arsitektur*

Tradisional dalam Era Modernisasi, Unit Kesenian Bali Maha Gotra Ganesha, Aula Barat ITB, Bandung, 27 September.

31. **Iwan Sudradjat** (1992), "Perkembangan Semiotik dalam Arsitektur. Sebuah Tinjauan Kritis", *Seminar Semiotik*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta, Desember.